

# PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

**Mahardika Evlyn**

*mahardikaevlyn@yahoo.com*

**Yuliasuti Rahayu**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

## ABSTRACT

*This research is aimed to examine the influence of local government financial performance which is measured by using the degree of decentralization, the ratio of local financial independence, and the ratio of the effectiveness of local own source revenue (PAD) to the Human Development Index (IPM) which is used as the standard of community welfare in terms of public services in the Districts / Cities in East Java Province. The approach has been carried out by using quantitative approach and multiple linier regressions analysis method. The population is 38 Districts / Cities East Java Province. The data is the secondary data in the form of Budget Realization Report (LRA) from 2014 to 2016. The data has been obtained from Local Finance and Asset Management Board (BPKAD) of East Java Province and the official website of Central Bureau of Statistics (BPS) of East Java Province. The data has been processed by using 21st version SPSS application. The result of this research indicates that the degree of decentralization gives positive influence to the Human Development Index and the ratio of local financial independence gives negative influence to the Human Development Index. Meanwhile the ratio of the effectiveness of local own source revenue does not give any influence to the Human Development Index.*

*Keywords: Decentralization degree, local financial independence ratio, effectiveness ratio of PAD, human development index (HDI).*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam hal pelayanan publik pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Populasi yang digunakan yakni 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Data diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur dan *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

**Kata Kunci:** Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## PENDAHULUAN

Tugas utama pemerintah daerah salah satunya yaitu tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, yakni kebijakan yang mengatur tentang otonomi daerah yang berarti juga bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah, serta memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran

serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain daerah otonom dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan meningkatkan potensinya agar tidak bergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki sekaligus tidak menjadi beban pemerintah pusat. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberi sumber-sumber keuangan untuk penyelenggaraan program pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintah pusat dan menentukan belanja rutin serta investasi (Mifda, 2011). Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang berisi tentang kebijakan untuk mengatur kewenangan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat. Prinsip dari desentralisasi fiskal adalah *money follow function*, yang berarti pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pembangunan di wilayahnya yang menjadi tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Diadakannya pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan tujuan daerah dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat, dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam tiap proses penyelenggaraannya. Menurut Oates (dalam Prakoso, 2017) desentralisasi fiskal diharapkan mampu mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam memproduksi dan menyediakan barang-barang publik.

Kinerja keuangan menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintah dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketika pemerintah daerah telah mampu memberikan pelayanan umum yang baik kepada masyarakat, maka dapat dikatakan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut tercapai. Menurut Badan Pusat Statistik tentang Indeks Pembangunan Manusia dijelaskan bahwa dalam menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia disuatu wilayah, dapat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia melalui penyediaan layanan publik yang baik. Semakin baik daerah dalam mengelola keuangannya maka akan memberikan dampak yang baik pula bagi tersedianya layanan publik. Layanan publik yang baik diharapkan mampu meningkatkan kehidupan masyarakat, peningkatan dalam kehidupan masyarakat dapat digambarkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (Anggraini dan Sutaryo, 2015). APBD dalam hal pembiayaan pembangunan di tiap sektor yang bersangkutan digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan perwujudan kualitas manusia yang tinggi di daerahnya. Tingkat pelayanan pada masyarakat yang rendah merupakan efek negatif dari rendahnya kapasitas dan kemampuan daerah dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga tidak mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia daerah tersebut. Berdasarkan sisi pendapatan, menurut Mahmudi (2010) ada tiga pengukuran kinerja yaitu pertama anggaran pendapatan yakni batas minimal jumlah target pendapatan yang harus diperoleh oleh pemerintah. Kedua pertumbuhan pendapatan yang menggambarkan bahwa kinerja pemerintah dalam memperoleh pendapatan mengalami kenaikan atau penurunan setiap tahunnya. Dan ketiga rasio keuangan yang menggambarkan tingkat kemandirian daerah. Sedangkan dari sisi belanja ada lima pengukuran, dua diantaranya yaitu pertumbuhan belanja yang bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ketahun dan rasio keserasian belanja yang menggambarkan keseimbangan antar belanja.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat dan

penduduk serta menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara dalam kualitas harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. Selain digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga digunakan sebagai salah satu alokator dana alokasi umum, oleh sebab itu Indeks Pembangunan Manusia bagi Indonesia dapat dikatakan sebagai data yang strategis. Dalam perencanaan pembangunan, pembangunan manusia yang menjadi tujuan utama. Karena dasar pembangunan adalah pembangunan manusia, maka perlu diutamakan alokasi belanja yang berhubungan dengan pembangunan manusia dalam penyusunan anggaran (Christy et al, 2009, dalam Prakoso, 2017). Menurut website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami kenaikan. Data yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2014 - 2016 yakni sebesar 68,14 pada tahun 2014; sebesar 68,95 pada tahun 2015; dan sebesar 69,74 pada tahun 2016. Maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 selalu mengalami peningkatan. Jika suatu daerah memiliki Indeks Pembangunan Manusia mendekati 100 maka kualitas manusia daerah tersebut dikatakan bagus, sehingga mampu mendukung pencapaian pembangunan ekonomi serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup penduduknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia? (2) Apakah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia? (3) Apakah Rasio Efektivitas PAD berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia? Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menguji pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia. (2) Untuk menguji pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. (3) Untuk menguji pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara agen dan prinsipal dengan menggunakan mekanisme suatu kontrak. Menurut Jensen & Meckling (1976, dalam Zelmianty, 2016) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara prinsipal dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Adanya hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah, ataupun hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat merupakan ciri negara yang demokrasi. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah harus mampu bertanggungjawab atas tugas yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Di lain sisi pemerintah daerah juga harus memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

Keterkaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara masyarakat yang diwakili oleh DPRD sebagai prinsipal dengan Pemerintah Daerah sebagai agen. Agen diharapkan dalam mengambil kebijakan keuangan dapat menguntungkan prinsipal, sedangkan prinsipal memiliki wewenang kepada agen berupa pengaturan serta memberikan sumber daya pendapatan daerah kepada agen dalam bentuk pajak, retribusi, dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil dengan baik atau tidak dalam menjalankan tugasnya (Prakoso, 2017).

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen pokok Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan relisasinya dalam satu periode pelaporan. (2) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. (3) Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. (4) Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sesuai dengan penggunaan anggaran daerah yang kuantitas dan kualitasnya telah diukur, pengukuran kemampuan daerah dapat dilihat melalui efisiensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah juga didefinisikan sebagai kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta memiliki keluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986 dalam Adhiantoko, 2013). Tujuan pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Mardiasmo, 2002 dalam Pramita, 2015) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu: (a) Membantu pemerintah untuk tetap fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik. (b) Sebagai sarana pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan. (c) Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik serta memperbaiki komunikasi kelembagaan.

### **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang berwenang untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang diperoleh dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007:231).

Lembaga perusahaan swasta telah menerapkan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas, namun untuk lembaga sektor publik, khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan pada perusahaan swasta. Selain itu, menurut Halim (2007) penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah

pengukurannya. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penelitian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan pada APBD menurut Halim (2007:232) adalah : (1) DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah atau masyarakat. (2) Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya. (3) Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. (4) Masyarakat dan kreditor, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi.

### **Derajat Desentralisasi**

Pratikno (2005, dalam Amani dan Dariwardani, 2009) berpendapat bahwa pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan pola hubungan yang sentralistis. Dalam pola hubungan yang sentralistis pemerintah pusat mendominasi segala segi pemerintahan. Adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi.

Derajat Desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiksial antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007:128). Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Widodo, 2001 dalam Adhiantoko, 2013). Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

### **Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggerakkan penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan membandingkan PAD yang telah ditargetkan dengan PAD yang terealisasi. Semakin tinggi angka rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu memenuhi target penerimaan PAD yang telah dianggarkan sebelumnya (Mahmudi, 2007 dalam Anggraini dan Sutaryo, 2015). Secara umum nilai efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dikategorikan: (1) >1,00 Sangat Efektif, (2) 1,00 Efektif, (3) 0,90-0,99 Cukup Efektif, (4) 0,75-0,89 Kurang Efektif, (5) <0,75 Tidak Efektif. (Mahmudi, 2010:143).

## Teori Indeks Pembangunan Manusia

*United Nation for Development Programme* (UNDP) telah membuat suatu indikator yaitu *Human Development Index* (HDI) atau yang lebih dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Human Development Indeks* digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan disuatu negara. *Human Development Index* (HDI) diterbitkan dalam bentuk laporan tahunan mengenai kinerja HDI pada negara-negara di dunia. *Human Development Report* (dalam Agustina *et al*, 2016) menyebutkan bahwa pembangunan manusia adalah sebuah proses perluasan dalam berbagai pilihan yang ada pada manusia (*"a process of enlarging people's choices"*). Berdasarkan pengertian tersebut, masyarakat merupakan tujuan akhir dari pembangunan, untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pembangunan. Sehingga, definisi dari pembangunan harus dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, tidak hanya menekankan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi saja.

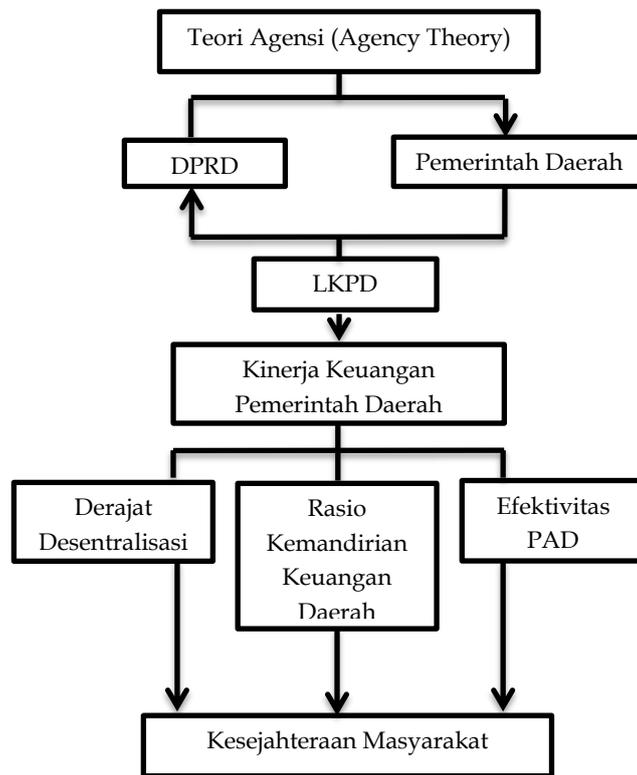
Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara yaitu: (1) Tingkat kesehatan diukur dengan harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi). (2) Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga). (3) Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Menurut Basu (dalam Pambudi, 2008) terdapat enam alasan pentingnya paradigma pembangunan manusia, yaitu : (1) Peningkatan harkat dan martabat manusia merupakan tujuan akhir dari pembangunan; (2) Pemberantasan masalah kemiskinan; (3) Peningkatan produktivitas dan peningkatan kontrol atas barang dan jasa secara maksimal; (4) Pemeliharaan konservasi alam (lingkungan) dan menjaga keseimbangan ekosistem; (5) Peningkatan basis masyarakat madani untuk pengembangan demokrasi; dan (6) Merawat stabilitas politik yang kondusif bagi implimentasi pembangunan.

Menurut UNDP (dalam Sari, 2016), pambangunan manusia memiliki premis-premis penting, yaitu : (1) Masyarakat sebagai pusat perhatian dalam pembangunan. (2) Pembangunan bukan hanya berfokus pada aspek ekonomi saja melainkan juga berfokus pada masyarakat secara keseluruhan. (3) Dalam pembangunan manusia tidak hanya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) masyarakat tetapi juga pemanfaatan kemampuan masyarakat dilakukan secara optimal. (4) Empat pilar pokok yang mendukung pembangunan manusia, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. (5) Pembangunan manusia menjadi dasar dalam menentukan tujuan pembangunan serta dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk tercapainya pembangunan yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, UNDP menjelaskan lebih dalam mengenai empat pilar pokok yang mendukung pembangunan manusia, yaitu: (1) Produktifitas. Masyarakat diharapkan mampu meningkatkan produktifitasnya dan ikut berpartisipasi dalam proses peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia. (2) Pemerataan. Seluruh masyarakat wajib memperoleh kesempatan yang sama. Semua kendala yang ada pada kesempatan ekonomi dan politik harus dihapus, supaya masyarkat dapat berpartisipasi dan memperoleh kesempatan yang ada sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut. (3) Kesinambungan. Akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga harus dipastikan sumberdaya tersebut ada untuk generasi mendatang. Segala bentuk sumberdaya baik fisik manusia maupun lingkungan harus selalu diperbaharui. (4) Pemberdayaan. Pembangunan harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Masyarakat harus ikut berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang akan menentukan (bentuk/arrah) kehidupan mereka.

**Rerangka Pemikiran**



**Gambar 1**  
Rerangka Pemikiran

**Pengembangan Hipotesis**

**Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Derajat Desentralisasi merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan (Mahmudi, 2007:128). Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh suatu daerah maka semakin tinggi pula dana yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam membangun layanan publik seperti peningkatan indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak yang ketiganya merupakan dasar pengukuran Indeks Pembangunan Manusia. Anggraini dan Sutaryo (2015) menyatakan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dari beberapa uraian tersebut, maka hipotesis pertama adalah:

H<sub>1</sub>: Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

**Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Tingkat kemampuan daerah untuk mandiri dalam membiayai kegiatan pada daerahnya digambarkan dalam kemandirian keuangan daerah. Dengan kata lain rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber daya yang berasal dari luar daerahnya sendiri. Menurut Mahmudi (2007:128) kemandirian setiap daerah tentunya berbeda-beda, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki daerah dalam pelaksanaan kegiatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka pemerintah daerah semakin berpotensi dalam menyediakan layanan publik seperti ketersediaan gedung sekolah yang layak dan memadai, alat-alat kesehatan yang lengkap yang mampu mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, dan keterjangkauan harga komoditas baik makanan maupun non makanan, sehingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

dapat tercapai. Amalia dan Purbadharmaja (2014) menyatakan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua adalah:

H<sub>2</sub>: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

### **Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Pemerintah daerah yang memperoleh pendapatan daerah tinggi belum tentu mampu melaksanakan kegiatan/program penyediaan layanan publiknya secara baik jika pendapatan yang diperoleh tidak dialokasikan dengan baik. Dalam menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatannya tidak hanya bergantung pada angka pendapatan, namun juga bagaimana pemerintah daerah mengolah pendapatan daerahnya. Kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan seluruh penerimaan PAD sesuai dengan apa yang ditargetkan ditunjukkan pada rasio efektivitas PAD. Dalam pengelolaan PAD yang secara efektif oleh pemerintah daerah diharapkan memiliki sumber daya yang cukup untuk pelaksanaan kegiatannya, yakni dalam hal penyediaan layanan publik khususnya bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang lain yang mempengaruhi standar layak hidup masyarakat sehingga tercapainya Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi. Prakoso (2017) menyatakan efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga adalah:

H<sub>3</sub>: Rasio Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu menganalisa data dalam bentuk angka dan melakukan analisis data sekunder dengan menggunakan prosedur statistika. Data sekunder dari penelitian ini yaitu pengumpulan data secara langsung diperoleh melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2016. (2) Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2016.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel Independen**

##### **Derajat Desentralisasi**

Derajat Desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan (Mahmudi, 2007:128). Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah tersebut tinggi.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

##### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari luar daerahnya. Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan daerah berarti ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat semakin rendah, dan begitu juga sebaliknya (Mahmudi, 2007:128).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

### Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan seluruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Semakin tinggi angka Rasio Efektivitas PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu memenuhi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah dianggarkan sebelumnya (Mahmudi, 2007:129).

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

### Variabel Dependen

Variabel dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Badan Pusat Statistik, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). UNDP membedakan tingkat human development index berdasarkan empat klasifikasi yakni: low (HDI < 50%), lower-medium (HDI antara 50% dan 65,99%), upper-medium (HDI antar 66% dan 79,99%) dan high (HDI 80% ke atas) (Ginting *et al*, 2008). Satuan human development index berupa index.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui signifikansi atau tidaknya pengaruh variabel independen Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Rasio Efektivitas PAD terhadap variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia. Persamaan fungsinya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{IPM} = \alpha + \beta_1 \text{DD} + \beta_2 \text{RKKD} + \beta_3 \text{REPAD} + \varepsilon$$

Dimana :

IPM	=	Indeks Pembangunan Manusia
$\alpha$	=	Konstanta
DD	=	Derajat Desentralisasi
RKKD	=	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
REPAD	=	Rasio Efektivitas PAD
$\varepsilon$	=	Tingkat kesalahan praduga dalam penelitian

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak diantara 11.100 Bujur Timur - 11.404' Bujur Timur dan 7.012' Lintang Selatan - 8.048'' Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 47.963 km<sup>2</sup> yang meliputi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70 persen atau 42.541 km<sup>2</sup>, sementara luas Kepulauan Madura memiliki luas 11.30 persen atau sebesar 5.422 km<sup>2</sup>. Jawa Timur memiliki 229 pulau yang terdiri dari 162 pulau dengan nama dan 67 pulau tanpa nama, serta dengan panjang pantai lebih kurang 2.834 km. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Kalimantan di Utara, Selat Bali di Timur, Samudra Hindia di Selatan, dan provinsi Jawa Tengah di Barat (Afkarina, 2017).

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Berdasarkan hasil olah SPSS 21 uji normalitas didapatkan bahwa gambar grafik normal *p-plot* menunjukkan bahwa pola data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dalam penelitian ini memenuhi uji normalitas. Ghozali (2006) menyatakan bahwa uji normalitas dengan grafik dapat

menyesatkan jika tidak dilakukan dengan hati-hati, secara visual tidak normal namun secara statistic normal. Oleh sebab itu dianjurkan di samping menggunakan uji grafik dilengkapi dengan uji statistic, salah satunya dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *kolmogorov-smirnov*. Jika hasilnya mempunyai nilai *P-value*  $\geq 0,05$  maka dikatakan data normal. Berdasarkan hasil olah SPSS 21 uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-smirnov* didapat nilai *kolmogorov-smirnov* Z sebesar 0,787 dengan tingkat signifikan 0,565 hal itu menunjukkan bahwa variabel penelitian terdistribusi normal karena tingkat signifikansinya  $\geq 0,05$  sehingga derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan Indeks Pembangunan Manusia berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Hasil dari Uji Multikolinearitas berdasarkan hasil olah SPSS 21 yaitu nilai Tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Artinya seluruh variabel independen pada penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas dengan aturan jika  $VIF < 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,10$  Maka tidak terjadi gejala multikolinearitas (Ghozali, 2006).

### Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi berdasarkan hasil olah SPSS 21 diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 0,957 terletak antara -2 sampai +2 maka tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

### Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas berdasarkan hasil olah SPSS 21 menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas. Titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini. Selain itu uji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Glesjser, yaitu dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS\_RES). Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Berdasarkan hasil uji glejser, dapat diketahui bahwa signifikansi ketiga variabel independen menunjukkan  $\text{sig} > 0,05$  sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tiap variabel tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

### Hasil Uji Kelayakan Model

#### Uji F (Goodness of Fit)

Tabel 1  
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1425,932	3	475,311	28,146	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1857,624	110	16,887		
	Total	3283,556	113			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), REPAD, RKKD, DD

Sumber: Data sekunder diolah, 2017.

Berdasarkan pada tabel 1 menunjukkan bahwa angka signifikansi sebesar 0,000. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05, maka signifikansi 0,000 lebih kecil dari pada tingkat signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini layak untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,659 <sup>a</sup>	,434	,419	4,10944	,957

a. Predictors: (Constant), REPAD, RKKD, DD

b. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data sekunder diolah, 2017.

Hasil uji pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai R Square (R<sup>2</sup>) sebesar 0,434 atau 43,4% yang berarti bahwa pengaruh dari variabel derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur adalah relatif rendah. Sedangkan sisanya 56,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak ada dalam model penelitian ini. Koefisien korelasi berganda ditunjukkan pada (R) sebesar 0,659 atau 65,9% yang mengindikasikan bahwa adanya korelasi atau hubungan yang tinggi antara variabel derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD dengan indeks pembangunan manusia.

### Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

**Tabel 3**  
**Hasil Uji t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	57,459	3,972		14,465	,000
	DD	67,715	11,702	1,199	5,787	,000
	RKKD	-13,079	4,457	-,608	-2,934	,004
	REPAD	3,371	3,397	,072	,992	,323

Sumber: Data sekunder diolah, 2017.

Dari hasil pengujian uji t pada tabel 3 dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi untuk variabel derajat desentralisasi sebesar 0,000 yang menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari *level of significant*  $\alpha = 0,05$  sehingga dapat dikatakan bahwa variabel derajat desentralisasi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Tingkat signifikansi untuk variabel rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 0,004 yang menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari *level of significant*  $\alpha = 0,05$  sehingga dapat dikatakan bahwa variabel rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan pada variabel rasio efektivitas PAD memiliki tingkat signifikan sebesar 0,323 yang menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari *level of significant*  $\alpha = 0,05$  maka dapat dikatakan bahwa variabel rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

### Pembahasan

#### Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 67,715 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ) maka H<sub>0</sub> ditolak yang berarti bahwa mendukung hipotesis (H<sub>1</sub>), artinya Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap

Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Sutaryo (2015), yang mengemukakan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Pada penelitian ini Derajat Desentralisasi dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan daerah. Derajat Desentralisasi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerahnya. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh suatu daerah maka semakin tinggi pula dana yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengadaan layanan publik yang baik dan adil untuk masyarakat seperti peningkatan indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak yang ketiganya merupakan dasar pengukuran Indeks Pembangunan Manusia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi suatu daerah dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut memungkinkan untuk dilaksanakannya pengadaan layanan publik bagi masyarakat yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.

### **Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,004 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ) dengan nilai koefisien regresi sebesar -13,079 maka  $H_0$  diterima yang berarti bahwa tidak mendukung hipotesis ( $H_2$ ), artinya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Amalia dan Purbadharmaja (2014) yang menyatakan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Melainkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, dilakukan oleh Anggraini dan Sutaryo (2015) yang menyatakan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pada penelitian ini Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Transfer. Sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki total pendapatan transfer lebih tinggi dari pada pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan asli daerah yang dimiliki belum mampu memenuhi kebutuhan pemerintah daerah yang tertuang pada pos belanja operasi. Belanja operasi bisa disebut juga dengan belanja aparatur daerah seperti belanja barang, belanja pegawai dan lain sebagainya. Sehingga apabila kebutuhan daerah yang tertuang pada pos belanja operasi belum mampu dipenuhi dengan semestinya, maka pos belanja modal yang berkaitan dengan layanan publik yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat juga tidak akan terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan analisis penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan yang tinggi juga dapat menurunkan kualitas layanan publik pada masyarakat, dikarenakan anggaran yang dimiliki lebih ditujukan untuk pos belanja operasi, sedangkan dalam pelaksanaan layanan publik guna mempertahankan layanan publik yang baik juga memerlukan dana. Apabila dana untuk pemeliharaan layanan publik tidak dapat dipenuhi, maka dapat menurunkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga Indeks Pembangunan Manusia juga akan menurun.

## **Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 3,371 dengan nilai signifikan sebesar 0,323 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ) maka  $H_0$  diterima yang berarti tidak mendukung hipotesis ( $H_3$ ), artinya Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Prakoso (2017), yang menyatakan bahwa Rasio Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, penelitian tersebut dilakukan pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Melainkan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh Handayani dan Sriyuniarti (2016), yang menyatakan bahwa Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap IPM.

Pada penelitian ini Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan membandingkan Realisasi PAD dengan Anggaran PAD. Dapat diketahui bahwa hasil dalam penelitian ini menunjukkan Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, kemungkinan hal ini terjadi karena meskipun pendapatan asli daerah dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah melebihi target yang dianggarkan, PAD tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah yang tertuang dalam pos belanja operasi. Apabila sebagian besar PAD digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tertuang dalam pos belanja operasi, misalkan hanya untuk memenuhi pos belanja pegawai, maka PAD tidak dapat dialokasikan untuk memenuhi aktivitas yang tertuang dalam pos belanja modal, dimana pos belanja modal merupakan pos pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat setempat atau pembangunan daerah untuk meningkatkan layanan publik. Sementara itu, dalam penelitian Wijayanti (2017) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas keuangan yang rumus perhitungannya sama dengan rasio efektivitas PAD tidak mempunyai pengaruh terhadap belanja modal, peneliti tersebut menyatakan bahwa terdapat dana anggaran daerah yang pada dasarnya merupakan dana publik tetapi justru sebagian besar dibelanjakan untuk belanja pegawai, maka pemerintah perlu untuk melakukan identifikasi ulang terhadap jumlah kebutuhan alokasi dana dari seluruh kegiatan secara lebih akurat dan detail sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, baik yang bersifat rutin maupun peningkatan pembangunan daerah untuk layanan publik.

Berdasarkan analisis hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas PAD yang tinggi tidak mempengaruhi meningkatnya layanan publik yang lebih baik untuk masyarakat, sehingga Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Simpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Berdasarkan Uji Kelayakan Model pada Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia, menunjukkan bahwa model tersebut layak digunakan dalam penelitian. (2) Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. (3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. (3) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan penelitian yang telah diungkapkan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah pada penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas objek penelitian yakni tidak hanya pada Provinsi Jawa Timur dan lebih memperpanjang rentang waktu penelitian, sehingga hasil penelitiannya lebih mungkin untuk disimpulkan secara umum. Dan penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh variabel - variabel lain yang

belum termasuk dalam model regresi penelitian ini seperti variabel non keuangan yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia misalnya pertumbuhan ekonomi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, H. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011). *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Afkarina, Z. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Agustina, E., E. Rochaida, dan Y. Ulfah. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Serta Indeks Pembangunan Manusia Di Kamilantan Timur. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen* 12(2).
- Amalia, F. R. dan I. B. P. Purbadharmaja. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal EP Unud* 3(6):257-264.
- Amani, S. N. dan N. M. I. Dariwardani. 2009. Kinerja Provinsi Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah. *www.artikel.com*. Diakses tanggal 8 oktober 2017.
- Anggraini, T. dan Sutaryo. 2015. Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*. Surakarta.
- Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014 - 2016. *www.jatim.bps.go.id*. Diakses pada tanggal 25 Juli 2017.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Handayani, D, dan F. Sriyunianti. 2016. Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Kota Di Sumatera Bagian Tengah. *National Conference of Applied Sciences, Engineering, Business and Information Technology*. ISSN:2541-111x.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Ekstusif, DPRD, Dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial Dan Politik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan Bagi Ekstusif, DPRD, Dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial Dan Politik*. Edisi Dua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mifda. 2011. Percepatan Pembangunan Dengan Desentralisasi Fiskal. *www.kompasiana.com*. diakses pada tanggal 25 November 2017.
- Pambudi, S. B. 2008. Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Prakoso, L. I. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung. *Tesis*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Pramita, P. R. 2015. Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sari, D. A. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Bandarlampung. *Skripsi*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

- Sumarjo, H. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- 
- \_\_\_\_\_. Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah*.
- 
- \_\_\_\_\_. Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*.
- Wijayanti, Y. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Zelmyanti, R. 2016. Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *JRAK* 7(1):11-21.